

## ABSTRAK

### **Siti Sofiah Nurhayati: “Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung No 281 tahun 2015 tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) pada Kelurahan Cisaranten Binaharapan Kecamatan Arcamanik Kota Bandung tahun 2017”**

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Bandung pada tahun 2015 dan kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 tahun 2015. PIPPK merupakan kebijakan baru dan diharapkan mampu mewujudkan kinerja aparatur kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan. Pada pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Cisaranten Binaharapan Kecamatan Arcamanik Kota Bandung tahun 2017 masih kurang optimal dalam implementasinya, beberapa permasalahan dalam realisasi PIPPK ditemukan pada saat observasi awal, diantaranya program pembangunan yang tidak selesai, pembangunan yang kurang sesuai dengan kebutuhan wilayah. Serta minimnya partisipasi masyarakat dalam implementasi PIPPK. Kondisi ini diduga disebabkan masih rendahnya kompetensi pelaksana programnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Cisaranten Binaharapan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan dari George C Edward III yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi (Engkus, 2017:220). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara secara langsung dengan aparatur yang ada di Kelurahan Cisaranten Binaharapan Kota Bandung, sebagai langkah untuk memperoleh hasil yang akurat. Dengan menggunakan teknik tersebut mampu memberikan jawaban yang baik dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Cisaranten Binaharapan tahun 2017 dilihat dari aspek komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi masih terdapat kelemahan sehingga menimbulkan kendala. Tidak sempurnanya kebijakan membuat beberapa *stakeholder* kurang mengerti perannya. Serta adanya keterbatasan sarana penunjang implementasi menimbulkan masalah bagi para pelaksana yang telah secara penuh mendukung pelaksanaan program ini, sehingga menimbulkan kurang efektifnya pelaksanaan pembangunan yang terjadi di wilayah Kelurahan Cisaranten Binaharapan, Dan minimnya partisipasi dari masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

## **ABSTRAK**

*The Regional Development and Empowerment Innovation Program (PIPPK) is one of the policies issued by the Mayor of Bandung in 2015 and this policy is contained in the Bandung Mayor Regulation Number 281 of 2015. PIPPK is a new policy and is expected to be able to realize the performance of the regional apparatus with village community institutions. In the implementation of PIPPK in Cisaranten Binaharapan Subdistrict Arcamanik Subdistrict, Bandung City in 2017, it was still not optimal in its implementation, some problems in the realization of PIPPK were found during initial observations, including development programs that were not completed, development that was not in accordance with regional needs. As the lack of community participation in the implementation of PIPPK. This condition is allegedly due to the low competence of program implementers. The purpose of this study is to find out the description of the implementation of PIPPK in Cisaranten Binaharapan Village.*

*The theory used in this study is the theory of policy implementation from Geoge C Edward III which includes Communication, Resources, Disposition, and Organization Structure (Engkus, 2017:220). The research method used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques used were interviews directly with the apparatus in the Cisaranten Binaharapan Village of Bandung City, as a step to obtain accurate results. Using this technique is able to provide good answers in the Development innovation and Regional Empowerment program.*

*The results showed that the implementation of PIPPK in Cisaranten Binaharapan Village in 2017 was seen from the aspects of communication, Resources, Disposition, and Organizational Structure there were still weaknesses which caused obstacles. The imperfect policy makes some stakeholders do not understand their role. As well as the limitations of the means of supporting implementation, this has caused problems for implementers who have fully supported the implementation of this program, which has led to a lack of effective implementation of development in the Cisaranten Binaharapan Village, and minimal participation from the community.*

*Keywords: Implementation, Public Policy, Innovation development programs and regional empowerment*